

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350
PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website : bakesbangpol.sultengprov.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. A r f a n, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. Rusdy Mastura**

Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. A R F A N, M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penerapan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	80
2.	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,7

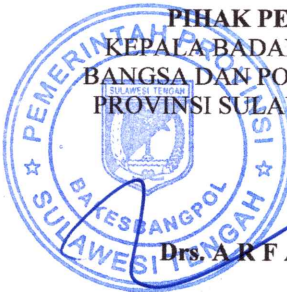
Program	Anggaran	Keterangan
1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 2.990.673.100	APBD
2. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 2.004.727.750	APBD
3. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 770.000.100	APBD
4. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 21.751.329.750	APBD
5. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp 245.091.250	APBD
6. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 11.861.610.128	APBD

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. A R F A N, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **I Wayan Yudana, AP, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. A r f a n, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

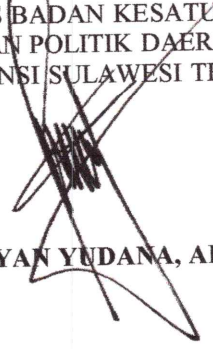
Palu, 03 Februari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. A R F A N, M.Si

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/keg/sub.keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Sasaran Program Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks RB Perangkat Daerah	70,00 (indeks)
	Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan	Nilai SAKIP Perangkat daerah	80 (nilai)
	Sasaran Sub. Kegiatan - Tersusunnya dokumen bukti dukung dalam E-Sakip Reviu (ESR) Kemenpan - Tersusunnya LAKIP - Tersusunnya MR dan Probis - Tersusunnya dokumen capaian IKU Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen pendukung E-Sakip reviu Kemenpanrb yang tersusun - Jumlah LAKIP SKPD - Jumlah MR dan Probis - Jumlah Laporan capaian IKU PD	8 dokumen 1 Laporan 2 Laporan 1 laporan
	Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah 5. Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah 6. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah 7. Meningkatnya pengawasan kearsipan internal 8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persentase TLHP BPK Dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE Persentase barang milik daerah yang dipelihara Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	60 60 62 60 60 60 60

PROGRAM/KEG/SUB.KEG	ANGGARAN	KETERANGAN
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 11,861,610,128.00	APBD
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 512,050,350	
- Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 196,361,700	
- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 87,572,800	
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 228,115,850	
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 8,690,424,849	
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 187,746,300	
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 248,422,926	
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 740,068,120	
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 242,592,250	
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 379,905,933	
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 860,399,400.00	

Palu, 03 Februari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Drs. A R F A N, M.Si

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
I WAYAN YUDANA, AP, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Kristo Suryanto Tumakaka, S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. A r f a n, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 03 Februari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. A R F A N, M.Si

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG POLITIK
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

	Sasaran Program/Keg/Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	SASARAN PROGRAM		
	Meningkatnya penerapan hasil pembinaan pendidikan politik oleh masyarakat	persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan pendidikan politik	100%
	SASARAN KEGIATAN		
	1. Meningkatnya pemahaman politik masyarakat	1. persentase meningkatnya pemahaman politik bagi parpol 2. Persentase meningkatnya pemahaman politik bagi ormas dan tokoh masyarakat	50% 50%
	SASARAN SUB. KEGIATAN		
	- Tersalurkannya hibah bantuan keuangan partai politik	- Jumlah partai politik penerima bantuan Keuangan	12 parpol
	- Tersosialisasinya kelompok perempuan tentang pendidikan politik	- Jumlah Partai Politik Yang Mengikuti Rapat Tata Cara Pengelolaan PertanggungJawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	12 parpol
	- Tersosialisasinya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	- Jumlah Peserta kelompok perempuan yang mengikuti pendidikan Politik	55 orang
	- Terevaluasi pengukuran IDI Provinsi Sulawesi Tengah melalui POKJA IDI	- Jumlah Peserta ormas dan tokoh masyarakat yang mengikuti Sosialisasi IDI	55 orang
	- Tersosialisasikannya Pemantapan Etika Budaya Politik bagi Partai Politik, dan Kelompok Masyarakat	- Jumlah Laporan Evaluasi POKJA IDI	4 laporan
	- Tersosialisasikannya Perundang-undangan bidang politik bagi Partai Politik, dan Kelompok Masyarakat	- Jumlah Peserta sosialisasi Pemantapan Etika budaya politik bagi Partai Politik dan Kelompok Masyarakat	50 orang
	- Tersusunnya rekomendasi penanganan situasi dan kondisi politik pasca pilkada 13 Kab/Kota	- Jumlah Peserta sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang politik bagi Partai Politik dan Kelompok Masyarakat	50 orang
	- Termonitoringnya dan terevaluasinya situasi perkembangan politik daerah Kab/Kota	- Jumlah rekomendasi penanganan Situasi dan Kondisi Politik Pasca Pilkada 13 Kab/Kota	1 rekomendasi
	- Tersedianya laporan situasi perkembangan politik daerah Kab/Kota	- Jumlah Kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi	13 kab/kota
		- Jumlah Kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi	13 kab/kota

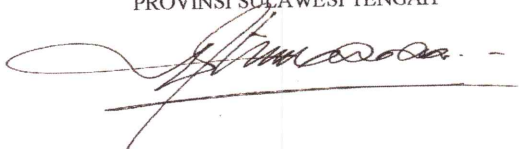
PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 2,004,727,750	APBD
1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi Politik.	Rp. 2,004,727,750	
- Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Sub. Kegiatan Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rp. 1,532,036,500	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 84,793,500	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rp. 234,508,250	
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rp. 153,389,500	

Palu, 03 Februari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. A R F A N, M.Si

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG POLITIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rustam Aripuddin, S.Ag, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. A r f a n, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 03 Februari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. A R F A N, M.Si

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WASBANG
BAKESBANGPOL PROV. SULTENG

RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/Keg/Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Sasaran Program Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Masyarakat	- persentase masyarakat yang mendapatkan layanan pembinaan Ideologi Pancasila dan wasbang	100%
	Sasaran Kegiatan - Meningkatkan kualitas pembinaan ideologi dan wasbang	- Persentase SMA/SMK, Perguruan Tinggi dan Organisasi Kepemudaan yang terbina ideologi dan wasbang	100%
	Sasaran Sub.kegiatan - Terbinanya masyarakat dalam rangkaian peringatan hari bela negara - Tersosialisasinya pembinaan kesadaran bela negara dan ketahanan bangsa terhadap generasi muda - Terselenggaranya gerakan nasional pembagian 10 juta bendera merah putih kepada masyarakat	- Jumlah masyarakat yang mengikuti rangkaian peringatan hari bela negara - Jumlah peserta generasi muda yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara dan ketahanan bangsa - Jumlah masyarakat yang di bagikan bendera merah putih	300 orang 150 orang 5.000 orang
II	Sasaran Program Meningkatnya toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar suku	- Persentase toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar suku	100%
	Sasaran Kegiatan - Meningkatkan kualitas pencegahan konflik suku	- Persentase pencegahan konflik suku	100%
	Sasaran Sub.kegiatan - Terselenggaranya Rapat Tim Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sulawesi Tengah - Tersosialisasinya penguatan dan pemantapan ideologi pancasila terhadap generasi muda - Tersosialisasinya Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pengembangan Karakter Bangsa terhadap generasi muda - Terevaluasinya Pelaksanaan Program Penguatan Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Kab/Kota	- Jumlah peserta Rapat Tim Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sulawesi Tengah - Jumlah peserta generasi muda yang mendapatkan sosialisasi penguatan dan pemantapan ideologi pancasila - Jumlah peserta generasi muda yang mendapatkan sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pengembangan Karakter Bangsa - Jumlah Kab/Kota yang di evaluasi	19 orang 50 orang 150 orang 13 kab/kota
	Sasaran Kegiatan - Meningkatkan kualitas pencegahan konflik suku	- Persentase Kelurahan yang terbina ideologi dan wasbang	100%
	Sasaran Sub.kegiatan - Tersosialisasinya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengamalan pancasila dan penumbuhan karakter keluarga - Terselenggaranya Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila - Terbinanya kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka - Terselenggaranya Penugasan Paskibraka (Peringatan Hari-Hari Besar Nasional) - Terlatihnya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi	- Jumlah keluarga yang diberikan penguatan pentingnya kesadaran ideologi pancasila Jumlah Purna Paskibraka yang mengikuti Diklat Duta Pancasila PurnaPaskibraka Jumlah PurnaPaskibraka yang diberikan Penguatan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan Jumlah Paskibraka yang telah terseleksi dan diberikan tugas pengibaran pada Hari-Hari Besar Nasional Jumlah Pelajar yang terseleksi dan diberikan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka	10 kelurahan 150 orang 50 orang 66 orang 66 orang

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2,990,673,100	APBD
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2,990,673,100	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 143,548,825	
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 60,338,250	
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 72,205,750	
- Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua Aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rp. 118,950,125	
- Sub Kegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Rp. 33,280,000	
- Sub Kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Rp. 40,883,750	
- Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas Paskibraka	Rp. 129,849,000	
- Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	Rp. 2,391,617,400	

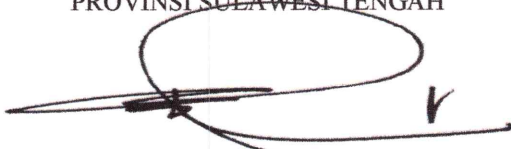
Palu, 03 Februari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. A R F A N, M.Si

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WASBANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Andi Musdalifah, S.Pd. SH. M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. A r f a n, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 03 Februari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. A R F A N, M.Si

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
BAKESBANGPOL PROV. SULTENG

ANDI MUSDALIFAH, S.Pd. SH. M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/Keg/Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Sasaran Program Meningkatnya kewaspadaan daerah	Persentase peningkatan kewaspadaan daerah dalam pencegahan konflik sosial	100%
	Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas pembinaan kewaspadaan daerah	Persentase peningkatan perangkat aparatur dan tokoh masyarakat yang terbina kewaspadaan daerahnya	
	Sasaran Sub.Kegiatan - Tersusunnya rekomendasi pemantapan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial (TIM FKDD & FKDM) - tersusunnya rekomendasi pemantauan orang asing dan lembaga asing di daerah (tim POALA) - Tersosialisasinya peningkatan kewaspadaan di wilayah perbatasan bagi aparatur, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda - Tersosialisasinya upaya pencegahan potensi konflik sosial - Tersusunnya laporan pelaksanaan rapat Forum Pimpinan daerah provinsi (Forkopimda) - Terdatanya dan Terkonsultasinya Laporan perkembangan situasi dan kondisi kab/kota di Sulawesi Tengah - Tersedianya dokumen rencana aksi daerah penanganan konflik sosial (RAD-PKS) tahun berjalan - terevaluasinya pelaksanaan RAD PKS tingkat Prov.Sulteng	- Jumlah rekomendasi pemantapan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial - Jumlah rekomendasi pemantauan orang asing dan lembaga asing di daerah (tim POALA) - Jumlah aparatur dan aparat keamanan serta para tokoh yang mengikuti rapat sosialisasi peningkatan kewaspadaan di wilayah perbatasan - Jumlah peserta sosialisasi - Jumlah laporan pelaksanaan rapat Forum Pimpinan daerah provinsi (Forkopimda) - Jumlah dokumen data perkembangan situasi dan kondisi kab/kota di Sulawesi Tengah - Jumlah dokumen RAD-PKS - jumlah laporan evaluasi pelaksanaan RAD PKS	1 rekomendasi 1 rekomendasi 75 orang 75 orang 4 laporan 13 laporan 1 dokumen 2 laporan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 770,000,100	APBD
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 770,000,100	
- Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Rp. 29,226,600	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 66,278,500	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Rp. 171,782,050	

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Rp. 125,309,400
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Rp. 377,403,550

Palu, 03 Februari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. A R F A N, M.Si

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ANDI MUSDALIFAH, S.Pd. SH. M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dody Setiawan, S.STP., M.AP**
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. A r f a n, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. A R F A N, M.Si

Palu, 03 Februari 2025
PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA
DAN KEMASYARAKATAN
BAKESBANGPOL PROV. SULTENG

DODY SETIAWAN, S.STP., M.AP

	- Tersosialisasinya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) - Terevaluasinya hasil pembinaan dan pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya di kabupaten Kota	- Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) - Jumlah laporan pelaksanaan	100 orang 1 laporan
V	<i>Sasaran Program</i> Meningkatnya toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama	Nilai Akumulasi Dimensi Utama Indeks Kerukunan Umat Beragama	100%
	<i>Sasaran Kegiatan</i> Meningkatnya Kualitas pembinaan kerukunan umat beragama	Persentase pembinaan kerukunan umat beragama	100%
	<i>Sasaran Sub. Kegiatan</i> - Tersalurkannya Hibah Bantuan Dana FKUB - Terbinanya masyarakat dan anggota FKUB dalam pemahaman kearifan lokal dan penguatan peran FKUB - Terevaluasi dan Tersusunnya rekomendasi perbaikan pembinaan FKUB	- Jumlah ormas penerima dana hibah - Jumlah anggota FKUB dan masyarakat yang mendapatkan penguatan peran FKUB - Jumlah Rekomendasi	1 ormas 25 orang 1 rekomendasi

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 21,751,329,750	APBD
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 21,751,329,750	
- Sub. Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Rp. 21,500,000,000	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 91,177,600	
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing diDaerah.	Rp. 74,535,150	
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Rp. 85,617,000	
II Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 245,082,250	APBD
2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 245,082,250	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Rp. 73,850,050	

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/Keg/Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	<i>Sasaran Program</i> Meningkatnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan	Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif	100%
	<i>Sasaran Kegiatan</i> Meningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terbina	100%
	<i>Sasaran Sub. Kegiatan</i> - Terpenuhihnya Kebutuhan pendanaan organisasi masyarakat ormas - Terbimbingnya ORMAS dalam pemenuhan legalitas - Terbina dan terberdayakannya Organisasi Kemasyarakatan - Terawasinya ORMAS oleh Tim terpadu Pengawasan Ormas - Tersalurkannya usulan dana hibah ormas - Terjalinnya kesepakatan bersama rekomendasi penanganan Isu-Isu Strategis Ormas - Tervalidasinya data dan informasi organisasi kemasyarakatan di 13 Kab/kota	- Jumlah ormas penerima dana hibah - Jumlah ormas yang dilegalitaskan - Jumlah ORMAS yang diberdayakan - Jumlah laporan dari hasil pengawasan Organisasi/Kelompok masyarakat - Jumlah usulan dana hibah ormas yang disalurkan - Jumlah Stakeholder - Jumlah dokumen evaluasi	3 ormas 20 ormas 40 ormas 1 laporan 3 ormas 13 Stakeholder 1 dokumen
II	<i>Sasaran Program</i> Meningkatnya kapasitas sinergitas FORKOPIMDA	Persentase sinergitas FORKOPIMDA	100%
	<i>Sasaran Kegiatan</i> Meningkatnya fasilitasi kapasitas sinergitas FORKOPIMDA	Persentase peningkatan kapasitas sinergitas FORKOPIMDA	100%
	<i>Sasaran Sub. Kegiatan</i> - Tersalurkannya hibah ke TNI/POLRI & Kejaksaan	- jumlah hibah yang tersalurkan Target	2 hibah
III	<i>Sasaran Program</i> Meningkatnya kapasitas organisasi masyarakat dibidang ekonomi, sosial dan budaya	persentase organisasi masyarakat yang meningkat kapasitasnya dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%
	<i>Sasaran Kegiatan</i> Meningkatnya kualitas pembinaan ORMAS dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Organisasi masyarakat yang terbina ketahanan ekonomi, sosial & Budaya	100%
	<i>Sasaran Sub. Kegiatan</i> - Tersosialisasinya pemberdayaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya bagi Ormas	- Jumlah ORMAS yang mengikuti sosialisasi pemberdayaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	10 ormas
IV	<i>Sasaran Program</i> Meningkatnya kapasitas pembinaan masyarakat dibidang ketahanan sosial dan budaya	persentase masyarakat (pelajar, tokoh masyarakat, ormas, dan pegawai) yang terbina dibidang ketahanan sosial dan	100%
	<i>Sasaran Kegiatan</i> Meningkatnya kualitas pembinaan masyarakat dibidang ketahanan sosial dan budaya	Persentase masyarakat (pelajar, tokoh masyarakat, ormas dan pegawai) yang terbina untuk bidang ketahanan sosial dan budaya	100%
	<i>Sasaran Sub. Kegiatan</i> - Tersosialisasinya pemberdayaan ketahanan sosial, dan budaya kepada masyarakat - Rapat Tim terpadu P4GN dan PN	- Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pemberdayaan ketahanan sosial, dan budaya - Jumlah peserta yang mengikuti rapat tim terpadu P4GN dan PN	100 orang 30 orang

- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah. Rp. 76,273,250
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah. Rp. 94,958,950



Palu, 03 Februari 2025
PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI,
BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN
BAKESBANGPOL PROV. SULTENG

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a series of loops and a final stroke that ends in a small 'A'.

DODY SETIAWAN, S.STP., M.AP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Moh. Arief Rakhman, SE., M.Si**

Jabatan : Ka. Sub. Bagian Keuangan dan Asset

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **I Wayan Yudana, AP, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 03 Februari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

PIHAK PERTAMA
KA.SUB.BAG KEUANGAN DAN ASSET
BAKESBANGPOL PROV. SULTENG

MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Terdistribusinya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP	- Jumlah ASN yang Terdistribusi Gaji, Tunjangan dan TPP	45 orang
	- Tersusunnya Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen
	- Tersusunnya Laporan Keuangan, Laporan Prognosis dan Laporan Rekonsiliasi Keuangan	- Jumlah Laporan Keuangan, Laporan Prognosis dan Laporan Rekonsiliasi Keuangan	3 laporan
	- Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen
	- Tersusunnya Laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah Laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan
	- Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan

SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
- Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 7,073,432,199	APBD
- Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 1,484,980,000	
- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 132,012,650	
- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 93,693,500	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 89,999,400	
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 4,053,400	

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

Palu, 03 Februari 2025
PIHAK PERTAMA
KA.SUB.BAG KEUANGAN DAN ASSET
BAKESBANGPOL PROV. SULTENG
MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Erni, SH, M.A.P**

Jabatan : Ka. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **I Wayan Yudana, AP, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 03 Februari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

PIHAK PERTAMA
KA.SUB.BAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
BAKESBANGPOL PROV. SULTENG

ERNI, SH, M.A.P

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Tersedianya unit kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit
	- Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56 unit
	- Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 unit
	- Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 unit
	- Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya bagi ASN perangkat daerah	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket
	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
	- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
	- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
	- Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan
	- Tersinkronisasinya program/kegiatan perangkat daerah	- Jumlah Laporan sinkronisasi program/kegiatan PD	1 laporan
	- Tersedianya layanan telepon	Jumlah Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Layanan Telepon	1 unit
	- Terpenuhinya Kebutuhan Air	Jumlah Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Layanan Air	1 unit
	- Tersedianya Layanan Listrik	Jumlah Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Layanan Listrik	1 unit
	- Tersedianya Layanan Internet	Jumlah Unit Kerja Yang Terpenuhi Layanan Internet	3 unit
	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	1 paket
	- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 paket

SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
- Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp. 24,960,000	APBD
- Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 217,632,250	
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 807,249,400	
- Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 53,150,000	
- Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 169,797,500	
- Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 78,625,426	
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 50,733,520	
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 70,008,200	
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 45,400,000	
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 59,000,000	

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 514,926,400
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 112,752,000
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 142,273,933
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 124,880,000



PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
IWAYAN YUDANA, AP, M.Si

Palu, 03 Februari 2025

PIHAK PERTAMA
KA.SUB.BAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
BAKESBANGPOL PROV. SULTENG

ERNI, SH, M.A.P